**PERNYATAAN PIHAK FAKULTAS**

TERHADAP

**ASPIRASI MAHASISWA FK UNS**

****

**KELUARGA BESAR MAHASISWA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2014**

1. **TANGGAPAN PEMBANTU DEKAN I**

Berdasarkan makalah yang merupakan hasil penjaringan aspirasi dari seluruh Program Studi yang ada di Fakultas Kedokteran UNS yang disampaikan kepada Pimpinan Fakultas, dalam hal ini dr. Hartono, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran UNS, pada

hari, Tanggal : Selasa, 1 Juli 2014

waktu : 12.30-13.30 WIB

tempat : Ruang Pembantu Dekan

diperoleh hasil sebagai berikut :

1. **Pertanyaan :**

**Jumlah dosen dirasakan kurang terutama pada prodi Kebidanan dan Psikologi. Kebijakan mengenai jumlah dosen merupakan kebijakan siapa?**

Jawaban PD 1 :

Mengenai jumlah dosen, pihak fakultas hanya mengajukan, eksekutornya adalah Rektor. Nantinya Rektor pun akan mengajukan ke Kementerian Pendidikan, sehingga untuk formasinya bergantung dari Kementerian Pendidikan. Adapun dasar dari pembagian dosen tersebut adalah analisis catatan berdasarkan rasio yang tertera dalam Permendikbud tahun 2014, untuk prodi bidang IPA rasionya adalah 1 : 30 (1 dosen untuk 30 mahasiswa). Jika didasarkan pada rasio tersebut, jumlah dosen di prodi Kebidanan dan Psikologi tergolong memenuhi, justru yang kekurangan adalah pada prodi pendidikan dokter, terutama pendidikan profesi.

Sebenarnya, kondisi di Fakultas Kedokteran mengenai jumlah dosen sudah lebih baik dibanding dengan fakultas-fakultas lain. Sehingga ketika universitas mendapatkan sejumlah dosen, tidak semuanya dialokasikan untuk Fakultas Kedokteran. Misalnya tahun lalu, UNS mendapat 23 dosen, dan 12 di antaranya diberikan pada Fakultas Kedokteran. Dan ketika kita mendapatkan jatah, sebagian besar akan lebih diprioritaskan ke pendidikan profesi, karena jumlah dosen di sana memang sangat kurang. Misalnya di stase Anestesi, kita hanya punya 1 orang dosen, 12 orang lainnya berasal dari kementerian lain sebagai dosen luar biasa. Bahkan di stase Orthopedi, kita tidak memiliki dosen. Walaupun milik prodi kita, namun dosen Orthopedi berasal dari staf RSUD. Sebagai gambaran, di rumah sakit, kita punya 65 staf dari prodi, namun 147 orang lainnya justru merupakan staf dari rumah sakit tersebut.

Jadi memang yang mengatur formasi jumlah dosen setiap universitas adalah Kementerian Pendidikan. Pengajuannya tetap dari kita, bahkan kita pernah mengajukan sampai 60 orang dosen. Namun, jika jumlah dosen sudah memenuhi syarat rasio di atas, maka akan lebih diprioritaskan untuk universitas lain yang belum memenuhi syarat.

1. **Pertanyaan :**

**Jadwal akademik di prodi Kebidanan, Hiperkes, dan K3 menggunakan sistem jarkom, sehingga jadwal tidak menentu. Bagaimana solusinya?**

Jawaban PD 1 :

Di Universitas Sebelas Maret, terdapat Sistem Informasi Penilaian Kinerja Dosen dan Sistem Remunerasi untuk pembayaran gaji via online yang langsung masuk ke web Dikti. Kedua sistem tersebut menuntut setiap dosen harus menjadwalkan jam mengajarnya di awal. Dalam setiap semesternya, setiap dosen wajib memenuhi 6 SKS. Dan untuk mencapai itu, dosen harus membuat program yang disusun di awal. Kemudian di akhir kinerja, dosen membuat laporan dengan bukti diri, dan inilah yang akan menjadi penilaian kinerja dosen. Jika dosen tidak menyusun jadwal di awal, atau jika dosen tidak memenuhi jam mengajar berdasarkan jadwal, nanti akan terlihat pada laporannya. Selain itu, dosen juga akan membuat SKP untuk perencanaan semester selanjutnya.

Sebagai gambaran, untuk mencapai 1 SKS, seorang dosen harus memenuhi jam mengajar sebanyak 100 menit x 8 kali. Sehingga untuk mencapai 6 SKS, dosen harus mengajar 100 menit x 48 kali. Jadi jadwal harus disusun di depan sehingga bisa tahu apakah 6 SKS tersebut sudah terpenuhi atau belum.

Hal ini sudah kami informasikan ke seluruh kaprodi, tapi memang belum semua prodi menjalankan, sepertinya baru Pendidikan Dokter dan Psikologi yang menjalankan sistem penjadwalan yang terintegrasi dan terstruktur seperti di atas. Kami sudah menghimbau setiap prodi untuk menjalankan sistem penjadwalan yang terstruktur ini, karena memang sistem di atas berlaku di seluruh UNS. Sistem ini sudah berjalan di fakultas lain, sedangkan di Fakultas Kedokteran belum seluruhnya menjalankan.

1. **Pertanyaan :**

**Sebagian teman-teman mahasiswa merasa kurangnya transparansi nilai, mengapa terjadi demikian?**

Jawaban PD 1 :

Ada beberapa faktor, di antaranya ketidaksiapan dosen dan ketidaksiapan mahasiswa. Pertama, dalam membuat soal itu tidak mudah, apalagi soal multiple choice. Jika setiap tahun dosen harus membuat soal yang baru seluruhnya, akan sulit. Pernah pada beberapa blok, kami menghimbau untuk mensosialisasikan seluruh soal beserta pembahasan. Sehingga untuk tahun berikutnya, otomatis dosen harus membuat soal yang benar-benar baru. Dan hasilnya, sekitar 85% mahasiswa tidak lulus. Itu yang menjadi kendala.

Terkait dengan kredibilitas, kita berpegangan pada moral. Selain audit, kami juga menjalankan sistem pengawasanan internal dan sistem penjaminan mutu agar tidak ada SOP yang dilanggar sehingga merugikan mahasiswa. Memang tidak memungkinkan semuanya ditransparansikan. Tapi percayalah, ada guideline dan SOP yang dijalankan oleh dosen sehingga tetap berpegangan pada asas keadilan dan asas objektivitas.

Saat ini audit kita adalah dari ISO, dan itu ketat sekali, apalagi untuk urusan nilai. Setelah jawaban ujian dikoreksi, nilai masuk ke situs fakultas dan dikunci. Ketika akan memperbaiki nilai, ada suatu mekanisme salah satunya dengan remidiasi. Sehingga tidak bisa seorang mahasiswa ingin memperbaiki nilainya tanpa melalui mekanisme yang ada. Itu yang dimaksud transparansi, dalam artian tidak bisa seorang mahasiswa atau pihak-pihak tertentu mengaudit nilai.

**Pertanyaan Lanjutan :**

**Lalu bagaimana dengan transparansi nilai yang dalam artian mahasiswa dapat mengetahui angka dari nilainya. Apa yang menjadi alasan sehingga nominal nilai ujian tidak dapat ditampilkan?**

Jawaban PD 1 :

Ya, itu juga menjadi masukan bagi kami. Tapi terkadang memang agak sulit dilaksanakan, karena ketidaksiapan dari mahasiswa sendiri. Kekhawatirannya adalah ketika nilai ditampilkan, kadang mahasiswa merasa nilainya tidak sesuai dengan jawaban ujiannya, sehingga mahasiswa tersebut protes. Pernah satu blok kami laksanakan seperti itu, dan yang terjadi adalah beradu argumen antara mahasiswa dan dosen.

Memang ada beberapa hal yang tidak dapat ditawar. Ada kewenangan mutlak dosen di sana. Jika tidak diberikan kewenangan mutlak seperti itu, akan kacau. Sedangkan mengenai perbedaan kualitas antara dosen yang satu dengan yang lain, itu tugas kami yang akan meningkatkan kualitas masing-masing dosen.

Kecuali jika mahasiswa siap, dalam artian memahami bahwa nilai tersebut adalah “putusan hakim” dalam hal ini yang dimaksudkan adalah putusan dosen yang sudah tidak dapat ditawar.

1. **Pertanyaan :**

**Bagaimana kejelasan mengenai Sekolah Vokasi untuk program Diploma?**

Jawaban PD 1 :

Pendidikan itu ada 3 jenjang : akademik, vokasi, profesi. *Basic* atau cor bisnis dari universitas adalah akademik. Seperti kita tahu, tri dharma perguruan tinggi : pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk pendidikan dan pengabdian masyarakat, semua jenjang dapat melaksanakan, tapi untuk penelitian hanya dapat dijalankan oleh S1, S2, dan S3. Sedangkan untuk diploma tidak bisa, karena *output*nya bukan berupa jurnal terakreditasi, tapi tugas akhir. Maka solusinya adalah dibentuk Sekolah Vokasi.

Untuk mengawali hal itu, dibentuk Sekolah Vokasi seperti halnya Pascasarjana, di mana kedudukannya bukan lagi di bawah fakultas, tapi bertanggung jawab langsung ke Rektor. Dengan begitu, fasilitas-fasilitasnya dapat terpenuhi dengan baik. Di rapat senat, hampir semua fakultas menyetujui konsep tersebut, sehingga pada tahun 2016 direncanakan semua diploma akan dijadikan satu. Yang mungkin pada tahun 2030an dan mampu mandiri, dapat lepas dari universitas dan menjadi Sekolah Tinggi, setara dengan universitas.

Karena sudah ada kebijakan ke arah Sekolah Vokasi, kami juga menghimbau untuk ke arah sana. Harapannya, fakultas dan prodi bisa bergerak bersama-sama mengajukan proposal untuk membangun gedung 6 lantai di Tirtomoyo. Jika nanti dipindah ke Kentingan dan tetap di bawah fakultas, akan sulit, karena kebijakan-kebijakannya tidak sama, seperti skripsi dan tugas akhir tadi.

Nanti dengan adanya undang-undang baru, akan ada program Magister Vokasi dan Doktor Vokasi. Sehingga memang kebijakan yang paling tepat adalah dengan didirikannya Sekolah Vokasi.

1. **Pertanyaan :**

**Bagaimana kejelasan mengenai penggunaan gedung 8 lantai dan kepindahan prodi Psikologi ke Kentingan?**

Jawaban PD 1 :

Sumber pendanaan universitas terdiri dari :

1. APBN Rupiah murni 🡪 dikelola DPR dan pemerintah
2. APBN PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) 🡪 gabungan dari SPP dan kerja sama

Kondisi fakultas kita sebenarnya kurang dana. Anggaran PNBP Fakultas Kedokteran UNS tahun lalu hanya sebesar 17.8 M. Itu meliputi sarjana, pendidikan profesi, dan diploma. Tahun ini sekitar 23 M karena merupakan akumulasi dari UKT, dan tahun depan diperkirakan 28 M.

Universitas-universitas dengan PNBP besar, misalnya Universitas Hasanuddin (±60M) dan Universitas Brawijaya (±70M), membangun gedung pendidikan (tidak termasuk rumah sakit) dengan menggunakan PNBP. Sedangkan UNS tidak dapat menggunakan PNBP, karena PNBP-nya kecil. Jadi untuk membangun gedung 8 lantai, harus menggunakan dana APBN. Sementara dalam mengusahakan dana APBN itu tidak mudah.

Rencana awal kami, setelah gedung 8 lantai jadi, prodi Pendidikan Dokter yang menempati gedung yang tersebar pindah semua ke gedung 8 lantai. Kemudian, Psikologi pindah ke gedung Parasitologi, dan lantai bawah gedung G digunakan untuk laboratorium Psikologi. Masalahnya, untuk pindahan butuh dana, dan perubahan dari laboratorium parasitologi menjadi gedung kuliah Psikologi juga butuh renovasi. Namun, baik prodi Psikologi maupun fakultas tidak mempunyai dana untuk hal tersebut. Rencananya, Psikologi pindah tahun 2016, tapi dengan catatan Psikologi punya dana untuk renovasi dan pindahan. Kalau tidak punya, kita minta dana ke universitas.

Setiap tahun, UNS mengajukan 10 proposal untuk dana APBN, dan alhamdulillah fakultas kita selalu dapat untuk membangun gedung 8 lantai. Rata-rata proposal yang diterima adalah 3 proposal, paling sering 2 proposal. Dalam 3 tahun terakhir ini, fakultas kita selalu dapat. Lalu bagaimana dengan fakultas lain? Sehingga belum tahu kapan pengadaan barang-barang dalam gedung 8 lantai dapat dilaksanakan. Karena jika proposal itu untuk pendirian gedung, maka dana yang diberikan tidak boleh digunakan untuk membeli sarana prasarana, misalnya AC. Padahal dana untuk AC saja mencapai 2M. Kalau mau menaikkan SPP untuk membangun gedung, juga diprotes. Gedung jadi iya, tapi belum tahu pindahannya kapan.

Kemudian, dengan adanya remunerasi, terdapat standarisasi gaji karyawan; dosen; sampai dekan, juga menuntut kita untuk memberikan gaji sesuai dengan standar. Lantas bagaimana dengan dana untuk pembangunan maupun sarana prasarana? Karena kebanyakan dana yang kita punya sudah terpakai.

Pihak Fakultas sudah bertekad untuk menyelesaikan pembangunan, termasuk gedung 8 lantai dan rumah sakit pendidikan. Namun nyatanya memang fakultas kita kekurangan dana. Fakultas Kedokteran adalah satu-satunya fakultas yang tidak punya uang, karena semua dananya langsung dibagi ke prodi. Berbeda dengan fakultas lain, dananya dipotong dulu untuk fakultas, baru dibagi ke prodi. Jika di fakultas kita diterapkan seperti itu, prodi yang kekurangan uang.

Universitas Sebelas Maret terkenal sebagai universitas yang paling murah, dan ada himbauan dari Dikti dan Rektor untuk tetap mempertahankan biaya yang murah, tapi tetap mengedepankan kualitas.

**Pertanyaan lanjutan :**

**Beberapa mahasiswa mengeluhkan biaya UKT yang baru dipublikasikan setelah mahasiswa diterima, bukan sebelumnya. Mengapa demikian?**

Jawaban PD 1 :

Itu juga pernah kami usulkan, mensosialisasikan biaya UKT sebelum pengumuman. Namun, kekhawatiran kami adalah terjadi seperti yang ada di UGM. Di UGM, sosialisasi biaya dilakukan sebelum pengumuman, akibatnya sekitar 1200 mahasiswa memanipulasi data diri agar dia bisa mendapat jatah UKT yang kecil. 1200 mahasiswa itu bukan jumlah yang kecil. Demikian juga dengan pengajuan keringanan, itu sebenarnya juga agak sulit dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal verifikasi data, karena ada mahasiswa yang rumahnya luar pulau.

1. **TANGGAPAN PEMBANTU DEKAN II**

Berdasarkan makalah yang merupakan hasil penjaringan aspirasi dari seluruh Program Studi yang ada di Fakultas Kedokteran UNS yang disampaikan kepada Pimpinan Fakultas, dalam hal ini dr. Reviono, Sp.P (K) selaku Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran UNS, pada :

hari, tanggal : Jumat, 27 Juni 2014

waktu : 10.30-11.10 WIB

tempat : Ruang Pembantu Dekan

diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kuisioner mahasiswa, fasilitas untuk Himpunan Mahasiswa di Kampus Mesen sudah lengkap. Jumlah ruang kelas untuk setiap angkatan dari Prodi Psikologi sudah cukup dan dirasa baik. Tempat parkir yang ada di Kampus Mesen dan Kentingan dirasa sudah cukup. Dan kemanan di Kampus Kentingan sudah baik.
2. Yang dikeluhkan adalah sarana penunjang akademik dan fasilitas umum seperti kantin.

Tanggapan : kantin sudah ada di bawah.

1. Mengapa pembangunan gedung 8 lantai berhenti?

Jawab : Pembangunannya sesuai dengan tahapan-tahapan karena menggunakan uang dari APBN dan PNBD, dan pada saat ini merupakan tahapan ke-5. Adapun tahapan-tahapan berikut sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahap Ke- | Besaran Dana | Sumber | Tahun |
| I | 5 Miliar | PNBP | 2010 |
| II | 27 Miliar | APBN | 2011 |
| III | 1 Miliar | PNBP | 2012 |
| IV | 25 Miliar | APBN | 2013 |
| V | 18 Miliar | APBN | 2014 |

Di mana tahap kelima ketentuan pencairan dana APBN 2014 pada bulan September 2014, sehingga rencana pembangunan akan dilanjutkan setelah adanya dana tersebut.

1. Apakah ada rencana bahwa Prodi Psikologi akan menjadi sebuah Fakultas dan berdiri sendiri, kemudian Prodi Diploma akan menjadi Sekolah Vokasi, sehingga gedung 8 lantai hanya akan digunakan Prodi Pendidikan Dokter saja?

Jawab : Ya. Namun untuk menjadi sebuah Fakultas baru, segala sesuatunya harus dipersiapkan secara matang, baik Sarana Prasarana, Sumber daya Manusia, dan penganggaran harus siap. Karena selama ini anggaran Prodi Psikologi masih kurang, dan segala sesuatunya masih bergabung dengan Fakultas. Sehingga pihak Prodi memang harus benar-benar dalam menyiapkannya.

1. Bagaimana kejelasan mengenai pemindahan lokasi pada Prodi Psikologi?

Jawab : Rencana akan dipindah di lokasi Kampus Kentingan, Gedung Parasitologi dan Lantai bawah Gedung Pasca Sarjana (gedung G)

1. Adakah perbaikan untuk sarana penunjang belajar yang ada di Kampus Mesen?

Jawab : Kalau ada yang rusak pasti akan diperbaiki karena semua yang ada di Kampus Mesen merupakan milik dari Universitas, bukan Prodi Psikologi itu sendiri.

1. Masalah keuangan : selama ini Prodi Psikologi disubsidi oleh Fakultas.
2. Untuk Kampus Tirtomoyo, bagaimanakan kejelasan mengenai nasib Kampus Tirtomoyo? Apakah ke depannya Kampus Tirtomoyo akan tetap digunakan atau dipindahkan ke Kampus Kentingan? Dan bagaimana kejelasan mengenai surat tanah yang ada di Tirtomoyo?

Jawab : Sebenarnya itu ranahnya pihak Universitas yang saat ini sedang diusahakan. Namun, sertifikat tanahnya bukan milik UNS.

1. Apakah Kampus Tirtomoyo boleh dilakukan renovasi mengingat sertifikat tanah yang belum ada kejelasan?

Jawab : Pada dasarnya boleh dilakukan renovasi. Hanya saja hingga saat ini belum dilakukan renovasi karena dari Prodi yang ada di Kampus Tirtomoyo tidak ada anggaran dananya.

1. Adakah perbaikan untuk sarana prasarana yang ada di Kampus Tirtomoyo?

Jawab : Tahun lalu untuk Prodi D3 Hiperkes sudah diperbaiki, lalu untuk Himpunan Mahasiswa Prodi K3 sudah diberikan tempat.

1. Adakah rencana perbaikan untuk sarana prasarana di Kampus Kentingan, Mesen, dan Tirtomoyo? Rencana perbaikannya dimulai dari yang mana?

Jawab : Prioritas yang akan dibangun pada tahun ini adalah kamar mandi Prodi Kebidanan. Sedangkan untuk Prodi Hiperkes sudah dibangunkan Kantor Pengelola, Prodi K3 sudah diberikan ruang kemahasiswaan, dan juga sudah dibangunkan hotspot area (gazebo) untuk digunakan bersama. Sementara untuk Prodi Psikologi tahun lalu, untuk aula sudah diperbaiki. Dan yang paling banyak perbaikan ada di Kampus Kentingan, terkait dengan gedung 8 lantai.

1. Adakah pemeliharaan fasilitas 3 lokasi Kampus Fakultas Kedokteran UNS?

Jawab : Ada, dilakukan oleh pihak Fakultas.

Demikian tanggapan yang diberikan pimpinan fakultas terkait hasil penjaringan aspirasi dari seluruh Program Studi di Fakultas Kedokteran UNS. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai civitas akademika FK UNS untuk membangun FK UNS yang lebih baik, dari segi akademik, lingkungan, pemeliharaan sarana prasarana, dan lain sebagainya.

Surakarta, 10 Agustus 2014

Ketua DEMA FK UNS Presiden BEM FK UNS

Afifah Novita Y. Abdullah Al-Hazmy

NIM. G0011006 NIM. G0011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Kedokteran

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr., SpPD, KR-FINASIM

NIP. 195106011979031002